



Strategi Kemitraan Tingkat Negara

Agustus 2016

Indonesia 2016–2019: Menuju Laju Pertumbuhan Lebih Tinggi, Lebih Inklusif, dan Berkelanjutan

Distribusi dokumen ini bersifat terbatas hingga disetujui oleh Dewan Direktur (*Board of Directors*). Jika persetujuan sudah diberikan, ADB akan mengungkapkan dokumen ini pada publik sesuai Kebijakan Komunikasi Publik ADB 2011.

Asian Development Bank

NILAI TUKAR MATA UANG
(sampai dengan 18 Agustus 2016)

Satuan mata uang	–	rupiah (Rp)
Rp1,00	=	\$0,00008
\$1,00	=	Rp13.184

SINGKATAN

ADB	–	<i>Asian Development Bank</i>
ASEAN	–	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
CPS	–	<i>country partnership strategy</i> (strategi kemitraan negara)
PDB	–	produk domestik bruto
TIK	–	teknologi informasi dan komunikasi
INDC	–	<i>intended nationally determined contribution</i>
MIC	–	<i>middle-income country</i> (negara berpenghasilan menengah)
PBL	–	<i>policy-based lending</i> (pinjaman berbasis kebijakan)
KPS	–	kerjasama publik swasta
RBL	–	<i>results-based lending</i> (pinjaman berbasis hasil)
RPJMN	–	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDG	–	<i>Sustainable Development Goal</i> (Sasaran Pembangunan Berkelanjutan)
BUMN	–	badan usaha milik negara
TA	–	<i>technical assistance</i> (bantuan teknis)

Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Meskipun ADB telah berusaha untuk memastikan ketepatan dari penerjemahan, namun, bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) adalah Bahasa Inggris dan hanya dokumen asli yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan otoritatif). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris.

CATATAN

Dalam laporan ini, "\$" mengacu pada dolar AS.

Wakil Presiden	S. Groff, Operasi Grup 2 (<i>Operations Group 2</i>)
Direktur-Jenderal	J. Nugent, Departemen Asia Tenggara (<i>Southeast Asia Department/ SERD</i>)
Kepala Perwakilan	S. Tabor, Kantor Perwakilan Indonesia (<i>Indonesia Resident Mission/ IRM</i>), SERD
Ketua tim	A. Gill, <i>Senior Country Specialist</i> , IRM, SERD
Anggota tim	S. Aman-Wooster, <i>Senior Social Development Specialist (Safeguards)</i> , SERD A. Franciscus, <i>Associate Project Analyst</i> , IRM SERD R. Hattari, <i>Financial Sector Specialist</i> , SERD A. Haydarov, <i>Public–Private Partnership Specialist</i> , IRM, SERD U. Hendrarini, <i>Senior Operations Assistant</i> , IRM, SERD U. Hoque, <i>Senior Social Development Specialist (Gender and Development)</i> , SERD B. Hutagalung, <i>Program Officer</i> , IRM, SERD C. Indrananto, <i>External Relations Officer</i> , IRM, SERD N. LaRoque, <i>Senior Education Specialist</i> , SERD N. Mardiniah, <i>Safeguards Officer (Resettlement)</i> , IRM, SERD A. Priasto, <i>Senior Economics Officer</i> , SERD J. Petersen, <i>Senior Portfolio Management Specialist</i> , SERD E. Quincieu, <i>Water Resources Specialist</i> , SERD L. Rahman, <i>Investment Specialist</i> , Departemen Operasi Sektor Swasta (<i>Private Sector Operations Department</i>) P. Ramachandran, <i>Senior Environment Specialist</i> , SERD D. Syarifa, <i>Associate Programs Analyst</i> , IRM, SERD P. Tharakan, <i>Senior Energy Specialist</i> , SERD S. Zaidansyah, <i>Senior Counsel</i> , Kantor Penasehat Hukum (<i>Office of General Counsel</i>)
Penelaah sejawat (peer reviewer)	S. Bhandari, <i>Principal Economist</i> , Kantor Perwakilan Nepal, Departemen Asia Selatan (<i>Nepal Resident Mission, South Asia Department</i>) D. Dole, <i>Senior Capacity Building & Training Economist</i> , ADB Institute

Dalam menyiapkan strategi kemitraan negara mana pun, atau pembiayaan proyek apa pun, atau dengan menyebut atau mengacu pada wilayah atau daerah geografis tertentu dalam dokumen ini, Asian Development Bank tidak bermaksud membuat penilaian apa pun mengenai status hukum atau status lainnya atas suatu wilayah atau daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
SEKILAS TENTANG INDONESIA	
I. GAMBARAN STRATEGI KEMITRAAN NEGARA	1
II. KONTEKS PEMBANGUNAN NEGARA	3
III. KERANGKA STRATEGI NEGARA	6
A. Pokok Penting dari Strategi Negara ADB Sebelumnya	6
B. Strategi Nasional Pemerintah	7
C. Prioritas Strategis dan Tujuan Operasional ADB	8
IV. PELAKSANAAN STRATEGI	15
A. Parameter Sumber Daya Indikatif	15
B. Menanggapi Kebutuhan Negara Berpenghasilan Menengah	15
C. Pemantauan Hasil	16
D. Risiko	16
LAMPIRAN	
1. <u>Kerangka Hasil Strategi Kemitraan Negara</u>	15
2. <u>Rencana Pengetahuan Negara</u>	17
3. <u>Daftar Dokumen Terkait</u>	21

SEKILAS TENTANG INDONESIA

Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015
PDB (\$ miliar, nilai saat ini)	892,1	918,5	911,40	888,4	861,9
PDB per kapita (\$, nilai saat ini)	3.677,2	3.761,3	3.662,8	3.523,1	3.373,9
Pertumbuhan PDB (% , pada harga konstan)	6,2	6,0	5,6	5,0	4,8
Pertanian	3,9	4,6	4,2	4,2	4,0
Industri	6,3	5,3	4,3	4,3	2,7
Jasa	8,4	6,8	6,4	6,0	5,5
Investasi domestik bruto (% PDB)	31,3	32,7	32,1	32,6	33,2
Tabungan domestik bruto (% PDB)	31,5	30,0	28,9	29,6	31,1
Indeks harga konsumen (perubahan % tahunan)	3,8	4,3	8,4	8,4	3,4
Likuiditas (M2) (perubahan % tahunan)	16,4	15,0	12,7	11,9	8,9
Keseluruhan surplus fiskal (defisit) (% PDB)	-1,1	-1,8	-2,3	-2,2	-2,5
Neraca perdagangan barang (% PDB)	3,8	0,9	0,6	0,8	1,5
Neraca transaksi berjalan (% PDB)	0,2	-2,7	-3,2	-3,0	-2,1
Biaya utang eksternal (% ekspor barang dan jasa)	12,5	17,3	20,7	23,1	29,1
Utang eksternal (% PDB)	25,0	27,4	29,1	33,0	36,1

Kemiskinan dan Sosial	1990	2000	Tahun Terbaru
Jumlah penduduk (juta)	179,4	206,3	257,6 [2016]
Pertumbuhan jumlah penduduk (perubahan % tahunan)	2,0	1,2	1,3 [2016]
Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	430,0	310,0	126,0 [2015]
Angka kematian bayi (> 1 tahun/per 1.000 kelahiran hidup)	61,7	41,1	23,0 [2015]
Angka harapan hidup pada waktu lahir (tahun)	63,4	67,3	68,7 [2013]
Angka melek aksara dewasa (%)	75,3	86,8 [2004]	95,9 [2014]
Angka kasar partisipasi sekolah dasar (%)	...	109	106 [2013]
Balita gizi buruk (% balita)	12,0 [1989]	18,6	18,8 [2015]
Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	15,1	23,4 [1999]	11,1 [2015]
Jumlah penduduk dengan akses ke air minum aman (%)	70,0	78,0	87,0 [2015]
Jumlah penduduk dengan akses ke sanitasi (%)	35,0	47,0	61,0 [2015]

Lingkungan	Tahun Terbaru
Emisi karbon dioksida (ton)	563.985,0 [2011]
Emisi karbon dioksida per kapita (ton)	2,3 [2013]
Luas hutan (juta hektar)	91,0 [2014]
Jumlah penduduk perkotaan (% dari jumlah penduduk total)	53,0 [2014]

Portofolio ADB (sampai dengan 31 Desember 2015)^a	OCR	ADF	Cofinancing	Total
Jumlah pinjaman total				
Negara	16	2		18
Non-negara	4			4
Nilai pinjaman bersih (\$ juta kumulatif)				
Negara	2.866,2	56,8	139,0	3.062,0
Non-negara	491,2		850,0	1.341,2
Pencairan				
Dana total yang dapat ditarik (\$ juta)				
Negara	2.866,2	56,8		2.923,0
Non-negara	98,2			98,2
Nilai tercairkan (\$ juta, kumulatif)				
Negara	1.391,9	7,6		1.399,5
Non-negara	110,5			110,5
Persentase tercairkan (nilai tercairkan/dana total tersedia)				
Negara	48,6	13,3		47,9
Non-negara				

... = tidak tersedia, () = negatif, [] = tahun terakhir data tersedia, ADB = Asian Development Bank, ADF = Asian Development Fund, PDB = produk domestik bruto, M2 = uang dalam arti luas, OCR = ordinary capital resources (sumber daya modal biasa).

^a. Portofolio aktif sampai dengan 31 Desember 2015

Sumber: Perkiraan Asian Development Bank, 31 Desember 2015.

I. GAMBARAN STRATEGI KEMITRAAN NEGARA

1. Indonesia telah mengalami kemajuan sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa dalam tujuh dasawarsa sejak kemerdekaannya. Negara ini memiliki demokrasi yang stabil dan ekonominya telah tumbuh lima kali lipat sejak pertengahan 1980-an. Indonesia memiliki pendapatan per kapita kira-kira \$3.374, sehingga menjadikannya negara berpenghasilan menengah (*middle income country* - MIC). Kemiskinan mutlak sudah turun dari 22% pada pertengahan 1980-an menjadi 11% pada 2015.¹ Angka melek aksara dewasa sudah hampir menyeluruh, akses ke pendidikan dasar sudah mencapai 100%, dan akses ke pendidikan menengah sudah 85%. Angka harapan hidup telah meningkat 8 tahun sejak 1990, dan mencapai 71 tahun pada 2015. Angka kematian bayi pun sudah memenuhi target Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goal*). Seluruh penduduk miskin di Indonesia memiliki akses ke asuransi kesehatan bersubsidi.

2. Namun, masih ada sejumlah tantangan signifikan. Basis pertumbuhan ekonomi masih sempit dan sangat bergantung pada pertambangan batu bara, minyak kelapa sawit, industri ekstraktif, dan properti mewah. Pola pertumbuhan semacam ini menyebabkan terkonsentrasinya kepemilikan dan kurang terciptanya lapangan kerja baru. Akibatnya, terjadi peningkatan ketimpangan dengan taraf kemiskinan yang tinggi di pulau-pulau wilayah timur, juga di daerah perdesaan dan pesisir. Banyak penduduk yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan dan berisiko jatuh kembali dalam kemiskinan. Produktivitas pertanian masih rendah, biaya transportasi dan logistik masih tinggi, akses ke energi rendah, dan terjadi kekurangan tenaga terampil. Urbanisasi yang cepat membebani kualitas pelayanan. Pertumbuhan juga diikuti dengan naiknya polusi air dan udara, sedangkan dampak perubahan iklim terlihat jelas dari banjir yang kian sering, kekeringan, kebakaran hutan, dan hujan badai.

3. Pertumbuhan ekonomi melambat dari rata-rata 5,7% pada 2006–2010 menjadi 4,8% pada 2015, terutama disebabkan oleh berakhirnya lonjakan harga komoditas dan kebijakan makroekonomi yang ketat untuk menurunkan inflasi, menekan defisit transaksi berjalan, dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Melambatnya pertumbuhan menguak berbagai kelemahan struktural dan kerentanan dalam perekonomian. Pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif memerlukan perluasan basis ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang baik, melalui investasi infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan tata kelola ekonomi.

4. Visi keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dari Pemerintah Indonesia adalah kedaulatan, kemandirian, dan kekuatan berlandaskan gotong-royong.² RPJMN mengedepankan pertumbuhan yang inklusif dan menjaga kelestarian lingkungan dengan mendorong semua warga negara dan daerah untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pertumbuhan. RPJMN memprioritaskan peningkatan besar-besaran skala investasi infrastruktur, peningkatan pendidikan dan pengembangan keterampilan, serta reformasi kebijakan guna meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan.

5. Strategi Kemitraan Negara (*Country Partnership Strategy* - CPS) 2016–2019 akan menyediakan program yang terfokus dan selektif dalam bentuk pinjaman dan dukungan pengetahuan. CPS ini merupakan tanggapan terhadap kebutuhan Indonesia dan prioritas pemerintah, serta dibangun berdasarkan bidang-bidang yang menjadi kompetensi kunci Asian Development Bank (ADB). CPS ini memasukkan pembelajaran dari berbagai CPS sebelumnya

¹ ADB. 2000. *Poverty and Inequality in Indonesia*. Manila.

² Pemerintah Indonesia. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2015–2019*. Jakarta.

dan selaras dengan rekomendasi dalam kajian tengah waktu (*midterm review*) terhadap Strategi 2020 ADB.³

6. Tujuan CPS adalah membantu Indonesia mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan menjaga kelestarian lingkungan. CPS akan mengedepankan tiga bidang prioritas: (i) peningkatan layanan infrastruktur, (ii) tata kelola ekonomi yang lebih baik, dan (iii) peningkatan pengembangan sumber daya manusia.

7. **Peningkatan layanan infrastruktur.** ADB akan membantu Indonesia meningkatkan investasi infrastruktur dan mengurangi rencana infrastruktur yang tertunda. Dukungan di bidang energi akan memperluas jangkauan, keandalan, dan efisiensi jaringan kelistrikan nasional, serta membantu pengembangan sumber energi bersih seperti gas alam dan panas bumi. Dukungan bagi pembangunan infrastruktur perdesaan akan meningkatkan produktivitas dan penghasilan perdesaan melalui investasi pada irigasi perdesaan, infrastruktur pasokan air, dan dukungan bagi diversifikasi ke pertanian yang bernilai lebih tinggi dan budi daya perairan untuk ketahanan pangan, serta peningkatan agroindustri dan produk perikanan laut dan darat. Pembangunan infrastruktur perkotaan akan dilakukan melalui pelayanan program sanitasi ke seluruh kota, yang akan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas di daerah perkotaan, serta persiapan bagi pembangunan perkotaan.

8. **Tata kelola ekonomi yang lebih baik.** ADB akan mendukung upaya pemerintah untuk mempertahankan belanja publik penting dalam jangka menengah hingga panjang di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDG). Dukungan juga akan diberikan guna memperkuat manajemen dan penyampaian layanan sektor publik melalui peningkatan manajemen, koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas sistem manajemen keuangan publik pada pemerintahan nasional dan daerah. ADB juga akan mendukung peningkatan terhadap iklim usaha, sistem pengadaan publik, dan mendorong peningkatan dalam kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pengaturan kelembagaannya. ADB akan terus membantu menciptakan sektor keuangan yang lebih luas dan dalam, serta mendukung mata pencaharian dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan inklusi keuangan, termasuk akses ke layanan keuangan bagi rumah tangga dan usaha kecil.

9. **Peningkatan pengembangan sumber daya manusia.** Dukungan ADB bagi pengembangan sumber daya manusia akan difokuskan terutama pada peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan keterampilan, melalui reformasi kebijakan dan manajemen sektor yang lebih baik. Akan diberikan dukungan pengetahuan guna meningkatkan sistem perlindungan sosial dan memperkuat layanan kesehatan.

10. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN dan akan sangat diuntungkan oleh kerja sama ekonomi ASEAN. CPS akan mendukung program kawasan guna meningkatkan mobilitas tenaga kerja, memperdalam peluang investasi, dan memperluas akses ke berbagai pasar. Kelestarian lingkungan akan didorong melalui (i) pembangunan infrastruktur yang memungkinkan pertumbuhan lebih bersih melalui infrastruktur energi bersih, (ii) ketahanan pasokan air (*water security*) yang lebih baik, dan (iii) dukungan untuk mencegah kebakaran hutan di dua taman nasional.

³ ADB. 2014. *Midterm Review of Strategy 2020: Meeting the Challenges of a Transforming Asia and Pacific*. Manila.

11. Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah dengan kebutuhan investasi yang besar. Keseluruhan pinjaman ADB di bawah periode CPS ini diperkirakan hanya mencapai kurang dari 1% dari keseluruhan investasi publik. Karena itu, CPS akan berfokus untuk memaksimalkan nilai tambah dan peran katalisator dari bantuan ADB. ADB akan memberi nilai tambah atas pembiayaan yang diberikannya dengan membantu pemerintah merancang dan melaksanakan program-program prioritas investasi publik, memperdalam pemanfaatan pengetahuan, mendorong sinergi antara operasi sektor publik dan swasta, menerapkan pendekatan terprogram terhadap dukungan reformasi kebijakan, dan membantu penguatan sistem nasional.

II. KONTEKS PEMBANGUNAN NEGARA

12. Indonesia telah mengalami kemajuan sosial luar biasa dalam tujuh dasawarsa sejak kemerdekaannya. Negara ini menganut demokrasi multipartai yang stabil. Pemerintahannya terdesentralisasi yang terdiri atas pemerintah nasional, 34 pemerintah provinsi, dan 491 pemerintah kabupaten/kota. Manajemen sektor publik telah terdesentralisasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 252 juta penduduk yang mendiami sekitar 6.000 dari 17.500 pulau. Perekonomian Indonesia telah tumbuh lima kali lipat selama tiga puluh tahun terakhir dengan PDB yang mendekati ke \$1 triliun, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor sepuluh terbesar di dunia dan satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara.⁴ Pendapatan per kapita sebesar \$3.374 menjadikan Indonesia negara berpenghasilan menengah (*middle income country*). Indonesia memiliki banyak sumber daya alam di darat maupun laut, dengan nilai ekspor yang meningkat dari \$25 miliar pada 1990 menjadi \$150 miliar pada 2015.

13. Indonesia memiliki kelas menengah yang jumlahnya besar dan terus meningkat, serta sektor swasta yang dinamis. Beberapa dekade pertumbuhan ekonomi yang kuat menghasilkan kemajuan jelas dalam pengurangan kemiskinan dan pembangunan sosial. Angka kemiskinan mutlak sudah turun dari 22% pada pertengahan 1980-an menjadi tinggal 11% pada 2015. Angka melek aksara dewasa mencapai 95%; cakupan pendidikan dasar dan menengah masing-masing mencapai 100% dan 85%; serta angka harapan hidup telah meningkat dari 63 tahun pada 1990 menjadi 71 tahun pada 2015.

14. **Kinerja dan kendala ekonomi.** Perlambatan pertumbuhan Indonesia (dari rata-rata 5,7% pada tahun 2006–2010 menjadi 4,8% pada tahun 2015) terutama disebabkan oleh berakhirnya lonjakan harga komoditas dan kebijakan makroekonomi yang diperketat demi menurunkan inflasi, menekan defisit transaksi berjalan, dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Penurunan drastis harga komoditas menguak berbagai kelemahan struktural dalam perekonomian Indonesia, termasuk daya saing sektor riil dan belum memadainya investasi untuk infrastruktur. Basis pertumbuhan ekonomi belum merata (karena bergantung pada pertambangan batu bara, minyak kelapa sawit, industri ekstraktif, pariwisata Bali, dan properti mewah). Pola pertumbuhan ini menyebabkan terkonsentrasinya kepemilikan dan kurang terciptanya lapangan kerja baru, yang lalu mengakibatkan peningkatan ketimpangan dan melambatnya pengurangan kemiskinan. Diperlukan sumber-sumber pertumbuhan baru guna mengatasi ketergantungan Indonesia pada pertambangan, minyak kelapa sawit, dan ekspor komoditas primer yang sudah berlangsung begitu lama.

⁴ Grup 20 (G20) adalah forum internasional bagi pemerintah dan gubernur bank sentral dari 20 perekonomian besar.

15. **Kemiskinan dan ketimpangan.** Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai miskin atau hampir miskin, dan sebagian besar dari mereka tinggal di pulau-pulau kawasan timur Indonesia, serta daerah perdesaan dan pesisir. Meskipun angka kemiskinan mutlak sudah turun ke 11%, sekitar 65 juta orang (27% penduduk Indonesia) hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan. Penduduk yang hampir miskin tersebut sangat rentan untuk jatuh kembali ke dalam kemiskinan; tiap tahunnya, lebih dari setengah penduduk miskin merupakan mereka yang tidak tergolong miskin di tahun sebelumnya.

16. Sejak 2010, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan kesenjangan tertinggi antara kelompok kaya dan miskin. Indeks Koefisien Gini yang mewakili distribusi pendapatan dan biasa dipakai untuk mengukur ketimpangan- naik dari 0,38 pada tahun 2010 menjadi 0,40 pada tahun 2015. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi juga berkontribusi terhadap melebarnya disparitas pendapatan daerah, dan beberapa provinsi di timur Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Jawa dan Bali dalam hal pendapatan per kapita. Sebagai contoh, pendapatan per kapita nominal tahunan Jakarta pada 2014 (\$14.816) adalah 14 kali lebih tinggi dari pendapatan per kapita Nusa Tenggara Timur (\$1.154).

17. Ada pula kesenjangan dalam mendorong akses yang setara ke layanan sosial. Indonesia mencatatkan perkembangan sosial yang solid, tetapi masih tertinggal untuk beberapa sasaran yang berkaitan dengan kesehatan; hampir sepertiga anak balita dilaporkan mengalami tinggi badan kurang (*stunting*), sedangkan angka kematian ibu sebesar 220 kematian per 100.000 kelahiran hidup berada jauh di atas target Indonesia untuk Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goal*). Akses berkelanjutan ke air minum yang aman dan sanitasi dasar juga masih tertinggal.⁵ Indonesia sudah mengalami kemajuan besar dalam mendorong kesetaraan gender, namun masih ada berbagai tantangan berat ke depannya. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah, dan perempuan yang bekerja masih terkonsentrasi pada pekerjaan informal dengan upah rendah dan keterampilan rendah.⁶

18. **Kesenjangan infrastruktur.** Investasi infrastruktur di Indonesia merosot tajam selama krisis keuangan Asia dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini. Investasi infrastruktur mencapai rata-rata 4% dari PDB per tahun dari 2004 sampai 2014, dibandingkan dengan lebih dari 7% pada pertengahan 1990-an. Kurangnya investasi infrastruktur secara kumulatif menimbulkan ongkos logistik yang tinggi (mencapai 24% dari nilai ekspor, salah satu yang tertinggi di Asia dan Pasifik). Demikian pula belum memadainya pasokan energi yang andal berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan mengurangi minat investasi swasta. Infrastruktur Indonesia yang belum memadai sebagian besar diakibatkan oleh rendahnya tingkat investasi publik dan swasta, rumitnya proses pengadaan tanah, lemahnya persiapan proyek, sistem pengadaan yang panjang dan berbelit-belit, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta anggaran yang baru disalurkan menjelang akhir tahun anggaran.

19. **Produktivitas dan pendapatan pertanian yang rendah.** Sejumlah besar rumah tangga memperoleh pendapatannya dari pertanian, tetapi mayoritas yang terlibat di sektor tersebut miskin atau hampir miskin.⁷ Produktivitas yang rendah di pertanian dan sektor perdesaan diakibatkan oleh kepemilikan tanah yang kecil dan terfragmentasi; tingginya jumlah petani tanpa tanah; pasar keuangan pertanian yang dangkal; dan kurangnya investasi pada infrastruktur dan

⁵ ADB. 2015. *Indonesia: Poverty Analysis*, [<http://www.adb.org/publications/summary-indonesias-poverty-analysis>].

⁶ ADB. 2015. *Indonesia: Gender Analysis*, [<http://www.adb.org/publications/summary-indonesias-gender-analysis>].

⁷ Pertanian memberikan lapangan kerja kepada 24 juta rumah tangga petani. Kemiskinan di Indonesia kebanyakan masih merupakan fenomena perdesaan dan pertanian: pada 2010, lebih dari 49% penduduk dengan pendapatan di bawah \$1,90 per hari hidup dan bekerja di pertanian.

teknologi perdesaan. Dihadapkan dengan jumlah penduduk yang meningkat dan pertumbuhan produktivitas yang lambat, impor pangan Indonesia terus bertambah, sementara harga pangan tetap tinggi dan bergejolak. Terbatasnya peluang pekerjaan non-tani di daerah perdesaan turut berkontribusi terhadap migrasi dari desa ke kota.

20. **Kurangnya keterampilan dan lapangan kerja.** Indonesia telah meraih pencapaian luar biasa dalam akses pendidikan di setiap tingkat, tetapi mutu pelatihan masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Saat ini, permintaan akan keterampilan tingkat atas meningkat lebih cepat daripada yang bisa disediakan oleh sistem pendidikan yang ada. Diperlukan penambahan pasokan tenaga kerja terampil dan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan mendiversifikasi kegiatan ekonomi.

21. **Urbanisasi yang cepat.** Sebagian besar pertumbuhan Indonesia dihasilkan di daerah perkotaan; 118 juta penduduk tinggal di daerah perkotaan, dan akan naik menjadi 183 juta pada 2025. Urbanisasi terjadi dengan cepat; lapangan kerja di perkotaan kini sudah lebih besar daripada di perdesaan. Penyediaan layanan perkotaan tidak mampu mengimbangi cepatnya pertumbuhan penduduk perkotaan. Diperlukan perencanaan perkotaan yang lebih menyeluruh dan penyampaian layanan perkotaan yang lebih efektif guna memastikan bahwa kota dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan perkembangan sosial.

22. **Iklim investasi yang lemah.** Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam menarik investasi sejak 2010, tetapi masih ada sejumlah tantangan besar. Biaya untuk menjalankan usaha, terutama di tingkat daerah, masih sangat tinggi, sebagian besar akibat inefisiensi peraturan dan administrasi. Hal ini menimbulkan banyaknya kegiatan sektor swasta informal.

23. **Sektor keuangan yang kurang berkembang.** Sektor keuangan Indonesia masih kecil dibandingkan PDB-nya. Sektor ini juga tidak efisien; biaya riil pinjaman domestik masih berada di atas negara-negara lain yang sekawasan. Pasar obligasi dan saham di Indonesia relatif masih kecil dengan keberadaan asing yang cukup besar, sehingga rentan terhadap arus keluar modal saat terjadi tekanan keuangan global. Reformasi sangat penting agar penggunaan sumber daya berjalan lebih efisien, dan demi menarik investasi swasta yang lebih tinggi. Hanya 13% dari penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem pinjaman, dan hanya seperlima dari 40% penduduk termiskin yang memiliki simpanan di institusi keuangan. Sebagian besar penduduk miskin bergantung pada simpanannya sendiri atau berhutang dari pedagang dan pemberi pinjaman dengan bunga sangat tinggi. Perbaikan akses oleh rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil ke layanan keuangan perlu ditingkatkan lagi demi mencapai pertumbuhan yang inklusif.

24. **Kualitas layanan yang lemah.** Pemerintah daerah bertanggung jawab menyampaikan sebagian besar layanan sosial di Indonesia. Dari antara keseluruhan belanja pemerintah, lebih dari 50% dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyampaian layanan di tingkat daerah masih terhambat oleh kendala kapasitas, termasuk kelemahan dalam manajemen keuangan publik.⁸

25. **Risiko lingkungan, perubahan iklim, dan bencana.** Pertumbuhan yang cepat menimbulkan degradasi lingkungan serta naiknya tingkat polusi air dan udara. Dampak perubahan iklim terlihat jelas dari intensitas banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan hujan badai; ada risiko sangat besar bagi 42 juta penduduk yang mendiami daerah dengan ketinggian

⁸ ADB. 2015. *Sector Assessment Public Sector Management* [<http://www.adb.org/publications/summary-indonesias-private-sector-development-assessment>]; dan ADB. 2014. *Indonesia: Promoting ICT in Indonesia* [<http://www.adb.org/publications/summary-indonesias-private-sector-development-assessment>].

kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Sejumlah besar penduduk Indonesia mendiami daerah yang rawan bencana alam, padahal frekuensi dan keparahan bencana diperkirakan akan meningkat. Polusi udara di daerah perkotaan, terutama ibu kota Jakarta, makin tinggi akibat pertumbuhan penduduk perkotaan dan kemacetan. Deforestasi akibat kebakaran hutan untuk pembukaan lahan berkontribusi besar terhadap tingkat polusi udara yang sangat tinggi di Indonesia serta negara tetangganya Malaysia dan Singapura, dan ikut berkontribusi pada tingginya tingkat emisi gas rumah kaca Indonesia.

26. Indonesia perlu mendorong model pertumbuhan dengan basis yang lebih luas, inklusif, dan menjaga kelestarian lingkungan jika pemerintah ingin mewujudkan tujuannya, yaitu pertumbuhan lapangan kerja, pendapatan, dan keberlanjutannya. Perlu dikembangkan model pertumbuhan yang baru guna meningkatkan daya saing dan membantu diversifikasi kegiatan ekonomi. Basis ekonomi yang lebih beragam akan membantu memperbesar peluang kerja dan meningkatkan distribusi pendapatan. Mengalihkan arah pertumbuhan agar tidak bergantung pada pertambangan dan konversi hutan untuk minyak kelapa sawit juga akan meningkatkan kelestarian lingkungan.

III. KERANGKA STRATEGI NEGARA

A. Pokok Penting dari Strategi Negara ADB Sebelumnya

27. **Strategi sebelumnya.** CPS 2012-2014 berfokus pada dua pilar: pertumbuhan inklusif dan kelestarian lingkungan, disertai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. CPS Sementara pada 2015 melanjutkan dukungan bagi sasaran dan tujuan yang sama, tetapi menyesuaikan program agar memasukkan peningkatan mutu dan akses ke pendidikan, serta pengembangan keterampilan, dukungan bagi sanitasi perkotaan yang lebih baik dan kota yang lebih layak didiami, serta penguatan manajemen keuangan publik.⁹

28. **Kajian akhir strategi kemitraan dengan negara.** Kajian akhir CPS dan validasinya oleh Departemen Evaluasi Independen (*Independent Evaluation Department*) di ADB menilai kinerja bantuan ADB selama periode CPS 2012–2014 sebagai *memuaskan*.¹⁰ Keduanya menyimpulkan bahwa program bantuan ADB sudah responsif terhadap kebutuhan Indonesia dan selaras dengan prioritas strategis pemerintah serta kebijakan korporasi ADB.

29. Pembelajaran penting dari periode CPS sebelumnya termasuk (i) pinjaman berbasis kebijakan (*policy-based lending*, PBL) harus dikaitkan pada program reformasi pemerintah, responsif terhadap perubahan kondisi global, dan mengadopsi pendekatan bertahap terhadap reformasi; (ii) bidang yang mendapat fokus dan dukungan berkelanjutan—energi, keuangan, tata kelola daerah, kebijakan pendidikan, dan pengembangan keterampilan—memiliki kinerja paling kuat; serta (iii) biaya transaksi untuk proyek investasi yang berdiri sendiri dinilai sangat tinggi dan memiliki dampak yang terbatas.

30. ADB memberikan nilai tambah terhadap PBL-nya selama periode CPS sebelumnya (di luar pembiayaan yang diberikan) dengan mendukung reformasi krusial di sejumlah bidang, termasuk pengembangan sektor keuangan, manajemen keuangan publik, pembangunan infrastruktur dan kerjasama publik swasta (KPS), serta peningkatan iklim investasi. PBL dan

⁹ ADB. 2015. *Country Operations Business Plan: Indonesia, 2015–2017*. Manila.

¹⁰ ADB. 2014. *Country Partnership Strategy Final Review: Indonesia* [<http://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/1-CPSFR-INO-2012-2014.pdf>]; dan ADB. 2014. *Country Partnership Strategy Final Review Validation: Indonesia* [<http://www.adb.org/documents/indonesia-country-partnership-strategy-final-review-validation>].

bantuan teknis (*technical assistance*, TA) terkait sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil sudah berbasis bukti dan dilaksanakan dengan urutan yang baik. Dengan mengadopsi pendekatan jangka menengah, PBL dan TA terkait membantu pelaksanaan reformasi yang penting, mulai dari tahap perencanaan awal hingga penerapannya.¹¹ Di sisi lain, pelaksanaan proyek investasi terhambat karena sulitnya pengadaan tanah, lemahnya kapasitas pelaksanaan, dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Tingginya biaya transaksi proyek konvensional dan preferensi pemerintah untuk menggunakan sistem negara mempengaruhi komposisi program pinjaman.

B. Strategi Nasional Pemerintah

31. RPJMN 2015–2019 (catatan kaki 2) disetujui pada Januari 2015, dengan visi kedaulatan, kemandirian, dan kekuatan melalui berlandaskan gotong royong. Target penting untuk 2019 mencakup (i) pertumbuhan PDB tahunan sebesar 8%; (ii) indeks Gini 0,36; (iii) PDB per kapita Rp72,2 juta, dibandingkan Rp43,4 juta pada 2014; (iv) angka kemiskinan 7%–8% dibandingkan 11% pada 2014; dan (v) peningkatan indeks mutu lingkungan ke 66,5–68,5, dibandingkan 63,0–64,0 pada 2014. RPJMN ini konsisten dengan komitmen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Indonesia yang diratifikasi pada 27 September 2015.

32. Tujuan RPJMN akan dicapai melalui strategi pembangunan yang mencakup fokus pada (i) ketahanan pangan dan energi, pembangunan maritim dan kelautan, serta pengembangan pariwisata dan industri; (ii) pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan perumahan; serta (iii) kesetaraan daerah melalui upaya mendorong kesetaraan peluang dan pendapatan di berbagai desa, daerah perbatasan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia.

33. Fokus penting rencana pemerintah pada 2015–2019 adalah memenuhi kebutuhan investasi yang masif dalam pembangunan infrastruktur. RPJMN akan mengupayakan peningkatan jumlah pembangkit listrik, jalan tol, dan fasilitas pelabuhan hingga hampir dua kali lipat selama periode 5 tahun.¹² Kebutuhan kasar infrastruktur pemerintah selama 2015–2019 diperkirakan sebesar \$430 miliar atau 9% dari PDB per tahun. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan \$23 miliar dari APBN untuk infrastruktur, sedangkan berbagai BUMN juga berencana membelanjakan \$24 miliar untuk infrastruktur, seperempatnya berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara. Reformasi kebijakan guna mendorong investasi infrastruktur oleh sektor swasta juga makin memperoleh momentum.¹³

¹¹ Pinjaman Berbasis Kebijakan/Policy-Based Lending di Indonesia (dapat diakses dari daftar dokumen yang berkaitan di Lampiran 3).

¹² Target spesifik mencakup (i) pembangunan kapasitas pembangkitan listrik baru sebesar 35 gigawatt; (ii) peningkatan persentase penduduk yang dapat mengakses listrik agar mencapai hampir 100% pada 2019; (iii) rehabilitasi 3 juta hektar sistem irigasi dan membuka tambahan 1 juta hektar lahan irigasi baru; (iv) pembangunan 1.000 km jalan tol baru dan 2.650 km jalan baru; (v) konstruksi 24 pelabuhan baru, 15 bandar udara baru, 3.258 km jalur kereta api baru, dan 1.099 km jalur kereta api perkotaan; (vi) perluasan teknologi informasi dan komunikasi pita lebar ke semua kota dan daerah; serta (vii) pembangunan 1 juta rumah baru.

¹³ Reformasi baru-baru ini termasuk (i) perampingan prosedur perizinan untuk investasi, (ii) perbaikan peraturan Kerjasama Publik-Swasta (PPP), (iii) suntikan modal bagi BUMN untuk mempercepat penyampaian infrastruktur, (iv) perubahan peraturan untuk pengadaan lahan tidak dengan sukarela guna mengurangi waktu proses dan ketidakpastian, (v) perluasan program pinjaman mikro dan penghapusan pajak berganda terhadap dana investasi real estat (REIT), (vi) perluasan skema pinjaman untuk usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor, (vii) penyederhanaan formula tahunan untuk menetapkan upah minimum; dan (viii) revisi daftar negatif investasi untuk membuka lebih banyak sektor bagi investasi asing.

34. Pemerintah bergerak cepat untuk menjadikan belanja publik lebih berpihak pada penduduk miskin. Pada 2015, pemerintah berupaya mengimbangi efek pengurangan subsidi listrik tak bertarget melalui pembayaran yang menyasar sektor kesehatan dan pendidikan dengan memanfaatkan kartu pintar. Pemerintah juga memperluas cakupan program asuransi kesehatan sosial dan jaminan sosial. Peningkatan besar dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan untuk langsung melibatkan warga desa miskin dalam membangun infrastruktur perdesaan.

35. Program reformasi pendidikan dalam RPJMN bersifat luas dan mencakup semua subsektor, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi, dengan sasaran keseluruhan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses belajar mengajar. Pendidikan wajib akan diperluas menjadi program 12 tahun untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Akses ke pendidikan teknis dan kejuruan akan ditingkatkan dan kaitan ke sektor swasta juga akan diperkuat. Untuk pendidikan tinggi, akan diberikan penekanan lebih besar pada integrasi pengajaran dengan penelitian ilmiah.

36. Pemerintah akan melanjutkan upaya reformasi kebijakan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, termasuk (i) meningkatkan orientasi hasil dalam perencanaan dan pengembangan APBN, (ii) melakukan modernisasi manajemen anggaran dan perbendaharaan, (iii) meningkatkan manajemen utang, (iv) memperkuat pemantauan dan evaluasi pengeluaran dan program publik, (v) meningkatkan sistem pengadaan publik, (vi) meningkatkan fungsi akuntansi dan audit pemerintah, (vii) meningkatkan mutu dan kinerja angkatan kerja melalui reformasi layanan sipil, (viii) memperkuat manajemen keuangan pemerintah daerah, dan (ix) memperkuat tata kelola dan upaya antikorupsi.

37. Strategi pemerintah untuk mengatasi tantangan lingkungan dan perubahan iklim dilaksanakan melalui Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru pada hutan primer dan lahan gambut dalam *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) yang disampaikan dalam kesepakatan global mengenai perubahan iklim yang dicapai saat *Conference of Parties* ke-21 di Paris. Pemerintah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030, melampaui skenario *business-as-usual*.

C. Prioritas Strategis dan Tujuan Operasional ADB

38. Pemerintah, berkerjasama dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat Indonesia, memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi sebagian besar tantangan pembangunannya. Pada 2015, keseluruhan dukungan dari mitra pembangunan untuk Indonesia mencapai kira-kira \$6 miliar, atau mewakili 0,6% dari PDB. Mengingat nilai kontribusi keuangan yang kecil, bantuan pembangunan perlu dimanfaatkan secara selektif untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah dan masyarakat sipil.

39. **Pendekatan ADB.** Dukungan pinjaman dan non-pinjaman ADB dirancang untuk (i) membantu kemajuan Indonesia menuju pencapaian SDG terpilih;¹⁴ (ii) mendukung RPJMN pemerintah dan prioritas dari kajian tengah waktu terhadap Strategi 2020 ADB (catatan kaki 3);

¹⁴ Bantuan ADB akan difokuskan terutama pada SDG 1 (target 1.1, 1.2, dan 1.5); SDG 2 (target 2.3 dan 2.5); SDG 4 (target 4.1, 4.4, dan 4.7); SDG 6 (target 6.2, 6.4, dan 6.5); SDG 7 (target 7.1, 7.2, dan 7.3); SDG 8 (target 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.10); SDG 9 (target 9.1 dan 9.2); SDG 10 (target 10.1 dan 10.4); SDG 11 (target 11.3 dan 11.6); serta SDG 13 (target 13.2 dan 13.3).

(iii) memberikan nilai tambah pembiayaan melalui dukungan pada peningkatan kebijakan, koordinasi kelembagaan, serta pengetahuan dan teknologi baru; (iv) merespons prioritas pemerintah dalam hal penggunaan sumber daya bantuan eksternal; dan (v) memiliki potensi mendorong kerja sama di antara mitra pembangunan.¹⁵

40. Guna memaksimalkan dampak pembangunan ADB, CPS memberikan dukungan melalui PBL bagi reformasi yang dipimpin pemerintah, dan akan membantu untuk merancang dan mendanai program strategis pemerintah yang besar, termasuk dengan menggunakan pinjaman berbasis hasil (*results-based lending/RBL*) dan proyek investasi sebagai katalisator, yang semuanya didasarkan pada penciptaan pengetahuan. CPS memasukkan pembelajaran dari CPS terdahulu, termasuk rekomendasi dari validasi kajian akhir CPS sebelumnya oleh Departemen Evaluasi Independen di ADB (catatan kaki 9). Fokus strategis dan pendekatan CPS selaras dengan rekomendasi kajian tengah waktu terhadap Strategi 2020 ADB.

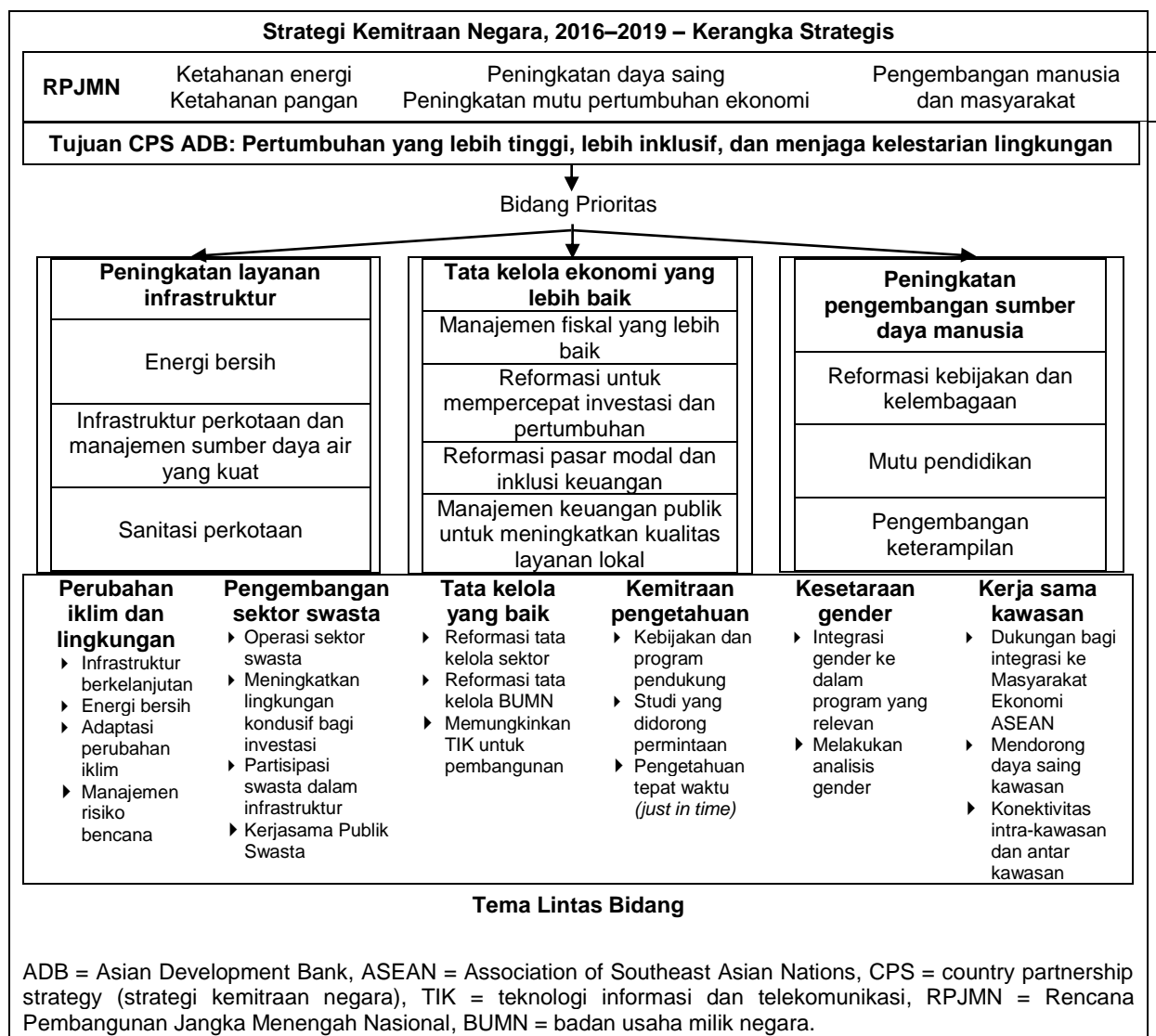
1. Tujuan Strategi Kemitraan Negara

41. CPS bertujuan mendukung Indonesia dalam mendorong proses pertumbuhan menuju sasaran pembangunannya, yaitu mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih inklusif, beragam, dan menjaga kelestarian lingkungan. CPS difokuskan pada tiga bidang prioritas, seperti yang ditetapkan oleh RPJMN: (i) peningkatan layanan infrastruktur, (ii) tata kelola ekonomi yang lebih baik, dan (iii) peningkatan pengembangan sumber daya manusia. Kerangka strategis CPS yang mengaitkan dukungan ADB dan prioritas RPJMN ditampilkan pada gambar di halaman 9. Kerangka hasil negara terdapat pada Lampiran 1.

42. **Pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif.** Dukungan ADB akan berkontribusi terhadap kemakmuran dan inklusi dengan turut mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperbesar peluang bagi rumah tangga berpenghasilan rendah untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan. Dukungan ADB bagi reformasi kebijakan akan membantu penguatan lingkungan yang memungkinkan sumber-sumber baru pertumbuhan inklusif. Pada gilirannya, ini akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan keseimbangan daerah yang diperlukan untuk mengatasi pertumbuhan saat ini yang sempit dan lambat. Dukungan ADB untuk peningkatan layanan infrastruktur ekonomi akan meningkatkan daya saing Indonesia, mendorong investasi, serta membantu menghubungkan kelompok dan daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia ke berbagai pasar dan layanan esensial. Dukungan bagi pembangunan infrastruktur perdesaan dan komersialisasi pertanian akan ikut berkontribusi bagi ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan perdesaan. Tata kelola ekonomi yang lebih baik akan berkontribusi bagi stabilitas makroekonomi dan menurunkan biaya usaha, sekaligus memperluas akses ke pembiayaan dan layanan lainnya yang diperlukan usaha kecil menengah, petani, dan perusahaan di daerah miskin agar dapat bersaing. Dukungan yang diberikan untuk meningkatkan mutu dan relevansi sistem pendidikan dan pelatihan akan menambah produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan prospek pekerjaan bagi kaum muda Indonesia. Dukungan pengetahuan dan reformasi kebijakan bagi penguatan sistem perlindungan sosial, termasuk penargetan dan distribusi bantuan sosial yang lebih baik, akan membantu segmen yang paling rentan di masyarakat.

¹⁵ Dukungan pinjaman sektor publik dari ADB sifatnya sangat terfokus dan selektif. Dukungan tidak diberikan: (i) di bidang yang bukan prioritas pemerintah untuk penggunaan sumber daya eksternal; (ii) jika peraturan pemerintah menghambat operasi ADB, misalnya dalam hal pinjaman kepada pemerintah daerah; (iii) di bidang yang ADB tidak memberikan kinerja memuaskan di masa lampau; (iv) jika pembiayaan dari sektor swasta akan lebih tepat; dan (v) untuk operasi pemerintah, baik secara tersendiri maupun dalam kombinasi dengan mitra lainnya, yang memiliki sumber daya dan kapasitas memadai guna mengatasi tantangan pembangunan tersebut secara khusus.

43. **Pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan.** Kelestarian lingkungan akan dibantu oleh pembangunan infrastruktur yang menempatkan negara ini pada jalur pertumbuhan ekonomi yang lebih bersih. Investasi pada jalur transmisi listrik dan energi bersih di kawasan timur Indonesia akan membantu mengurangi listrik yang hilang serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar diesel yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Peningkatan irigasi, manajemen air dalam jumlah besar, manajemen banjir, dan akuakultur akan meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan sumber daya air yang semakin langka. Mengedepankan kegiatan ekonomi berkelanjutan di lingkungan kelautan akan mendorong kondisi laut yang lebih sehat. Dukungan untuk sanitasi perkotaan akan berkontribusi langsung dalam meningkatkan kondisi lingkungan perkotaan seiring pesatnya perkembangan kota. ADB juga mendukung upaya mencegah kebakaran hutan di dua taman nasional di Kalimantan Barat, serta akan membantu kemitraan trilateral antara Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia untuk manajemen kebakaran hutan berbasis masyarakat di bawah inisiatif *Heart of Borneo*.



2. Bidang Prioritas

44. **Peningkatan layanan infrastruktur.** Pertumbuhan inklusif terhambat oleh infrastruktur yang belum memadai. Akses ke pasar dan layanan dasar terhambat akibat jaringan transportasi yang padat, terbatasnya jangkauan pita lebar, dan kebutuhan listrik yang melebihi pasokannya. Kesenjangan antara akses infrastruktur di bagian timur dan barat Indonesia makin melebar, sehingga membuat sejumlah daerah termiskin negara ini terkucilkan dari proses pertumbuhan. Urbanisasi berlangsung dengan pesat, membebani kemampuan kota-kota besar dalam menyediakan pelayanan sosial dan ekonomi. Indonesia telah membuktikan bahwa realokasi subsidi bahan bakar fosil ke pembangunan infrastruktur dapat dilakukan, dan pemerintah kini memperbesar belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan.

45. Perluasan pembangunan infrastruktur memberi peluang bagi pemerintah untuk membawa Indonesia ke jalur pertumbuhan yang lebih bersih. Dampak perubahan iklim sangat besar di Indonesia. Pemerintah secara intensif terlibat dalam forum internasional dan dalam menerjemahkan komitmen globalnya menjadi program domestik. Indonesia juga mendapat

dukungan kuat dari mitra bilateral dan PBB terkait perubahan iklim. ADB akan mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi iklim ke dalam program individual (secara khusus pada program manajemen banjir, irigasi, dan keamanan pasokan air); serta dukungan untuk mengedepankan energi terbarukan atau bahan bakar lebih bersih, dan peningkatan sistem transmisi listrik. ADB akan terus memberikan saran teknis mengenai prakiraan risiko perubahan iklim, sanitasi perkotaan, dan pencegahan kebakaran hutan di dua taman nasional. Meskipun kapasitas pemerintah untuk menangani risiko bencana cukup kuat, dukungan ADB bagi pengarusutamaan perubahan iklim akan berkontribusi mengurangi risiko bencana alam terkait perubahan iklim.

46. ADB akan mendukung pencapaian pemerintah terhadap komitmen INDC-nya. Dukungan mitigasi ADB akan membantu Indonesia beralih ke jalur pertumbuhan yang lebih bersih dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan bersih, serta mendorong konservasi energi. ADB akan ikut mendukung adaptasi perubahan iklim dengan meningkatkan manajemen sumber daya air guna mendorong pemanfaatan sumber daya air secara lebih berkelanjutan.

47. Dalam kontribusinya bagi pasokan dan akses energi, ADB akan mendukung kebijakan, pengaturan kelembagaan, dan program investasi strategis yang lebih baik. Dukungan ADB akan melengkapi program elektrifikasi perdesaan, peningkatan kebijakan energi terbarukan, dan membiayai investasi untuk memperluas jangkauan, keandalan, dan efisiensi jaringan listrik nasional, serta mendorong penggunaan lebih banyak sumber energi primer yang bersih. Pembiayaan yang inovatif akan digunakan.¹⁶ Reformasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi investasi publik, menstimulasi partisipasi sektor swasta yang lebih besar, meningkatkan akses energi, dan meningkatkan bauran energi melalui peningkatan ketersediaan sumber daya energi bersih akan menjadi perhatian. Program ADB akan membantu mengatasi kendala terdahulu berupa subsidi listrik dan prosedur perizinan yang memberatkan, serta kerangka peraturan yang kurang berkembang. ADB akan memberikan dukungan analisis dan pengetahuan secara luas kepada pemerintah agar memiliki informasi lengkap untuk reformasi kebijakan publik yang dapat mendorong investasi swasta dalam energi bersih, dan juga untuk mengidentifikasi teknologi baru seperti uji coba penangkapan dan penyimpanan karbon.

48. Mendorong produktivitas dan pendapatan perdesaan sangat penting sebagai dasar bagi perekonomian perdesaan yang lebih sejahtera. ADB akan memberikan kombinasi dukungan kebijakan, irigasi perdesaan, dan investasi infrastruktur pasokan air, serta dukungan bagi pengembangan rantai nilai dan diversifikasi ke komoditas pertanian bernilai tinggi. Langkah-langkah ini akan meningkatkan produktivitas perdesaan, serta menciptakan lapangan kerja lebih luas dan peluang kerja non-tani bagi petani kecil dan buruh tani.

49. CPS akan mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan, dimulai dari sanitasi perkotaan, guna mengatasi risiko langsung terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan penduduk miskin perkotaan. Untuk tujuan ini, CPS akan mendorong pendekatan manajemen air limbah dan air kotor yang koheren di seluruh bagian kota, sambil mengembangkan rencana dan kebijakan yang mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan. ADB juga akan membantu pengembangan kapasitas beberapa kota utama agar memiliki pusat perkotaan yang lebih layak

¹⁶ Pada Desember 2015, Dewan Direktur ADB menyetujui RBL sektor energi negara untuk memperkuat sistem transmisi; RBL diberikan kepada BUMN terkait dengan jaminan dari pemerintah, yang merupakan bentuk sumber pendanaan inovatif di Indonesia. ADB. 2015. *Indonesia: Electricity Grid Strengthening – Sumatra*. <http://www.adb.org/projects/documents/ino-electricity-grid-strengthening-sumatra-program-phase-1-rrp>.

huni, termasuk perencanaan perkotaan yang lebih baik dan sistem transportasi perkotaan yang lebih modern.

50. **Tata kelola ekonomi yang lebih baik.** Diperlukan reformasi yang substansial untuk menjadikan Indonesia lebih mampu bersaing dan meningkatkan penyediaan layanan publik bermutu tinggi bagi mereka yang paling membutuhkannya. Tata kelola ekonomi yang meningkat secara mantap sangatlah penting jika Indonesia ingin mendiversifikasi sumber pertumbuhannya dan mendorong tingkat pertumbuhan ke 8% pada 2019, serta meningkatkan pendapatan per kapita hingga 11% per tahun selama periode RPJMN ini. Pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan belanja publik pada sektor sosial dan infrastruktur publik, serta meningkatkan efisiensi pengeluaran publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan membalikkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Meskipun demikian, pemerintah juga dihadapkan pada ketidakpastian di pasar komoditas dan keuangan global, yang berdampak buruk terhadap penerimaan pemerintah.

51. ADB akan mendukung reformasi fiskal guna membantu upaya pemerintah mempertahankan belanja publik penting dan meningkatkan mobilisasi penerimaan dalam jangka menengah hingga panjang. Dukungan akan diberikan untuk membantu pemerintah memperkuat kerangka pengeluaran jangka menengah, dan melindungi prioritas pengeluaran publik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sejalan dengan SDG. Guna memperkuat manajemen sektor publik dan penyampaian layanan, dukungan ADB akan meningkatkan reformasi desentralisasi fiskal; meningkatkan kapasitas pegawai negeri tingkat daerah yang terlibat dalam manajemen keuangan publik; serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperkuat sistem manajemen keuangan publik, terutama melalui penggunaan teknologi informasi dan pengenalan sistem transfer yang dikaitkan dengan penyampaian layanan di daerah bersangkutan.¹⁷

52. Peningkatan daya saing sektor perdagangan dapat dicapai dengan mengurangi biaya pembukaan dan menjalankan usaha, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan akses ke TIK bagi *e-commerce* dan program pelayanan.¹⁸ ADB juga akan mendukung upaya peningkatan lingkungan bisnis yang memberdayakan, memodernisasi sistem pengadaan publik, dan mendorong peningkatan kebijakan TIK dan pengaturan kelembagaan guna melaksanakan rencana pita lebar nasional Indonesia.

53. Sektor keuangan yang lebih dalam dengan basis lebih luas akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi produktif, mendorong stabilitas ekonomi yang lebih kuat, serta mendukung mata pencaharian dan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan akses rumah tangga dan usaha kecil ke layanan keuangan. ADB akan terus membantu pendalaman sektor keuangan dengan meningkatkan infrastruktur pasar dan mendorong diversifikasi produk di pasar obligasi. ADB akan mendukung peningkatan inklusi keuangan dengan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan regulasi, rendahnya literasi keuangan, lemahnya perlindungan konsumen, dan dengan mengembangkan produk kredit mikro yang inovatif agar dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. ADB akan memberikan dukungan konsultasi, teknis, dan keuangan bagi usaha kecil menengah untuk memungkinkan kelompok ini membangun rantai nilai yang layak dan berintegrasi ke pasar kawasan dan global.

¹⁷ ADB. 2015. *Sector Assessment Public Sector Management* [<http://www.adb.org/publications/summary-indonesias-private-sector-development-assessment>]; dan ADB. 2014. *Indonesia: Promoting ICT in Indonesia* [<http://www.adb.org/publications/summary-indonesias-private-sector-development-assessment>].

¹⁸ ADB. 2015. *Private Sector Assessment* [<http://www.adb.org/publications/summary-indonesias-private-sector-development-assessment>]; dan ADB. 2015. *Indonesia: Constraints to Private Sector Development*. Manila.

54. **Peningkatan pengembangan sumber daya manusia.** Kemajuan dalam meningkatkan akses ke pendidikan telah banyak dicapai, tetapi mutu pendidikan masih harus ditingkatkan secara signifikan. Mendongkrak produktivitas tenaga kerja akan memungkinkan Indonesia bersaing di pasar global dan menghasilkan lapangan kerja yang diperlukan untuk menyerap dua juta penduduk muda yang memasuki pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Dukungan ADB bagi pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik akan difokuskan terutama pada peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan keterampilan. ADB akan membantu upaya pemerintah meningkatkan mutu dan relevansi belanja pendidikan melalui dukungan bagi reformasi kebijakan pendidikan, peningkatan manajemen sektor pendidikan, serta untuk perancangan dan pelaksanaan program reformasi penting dari pemerintah.

55. Dukungan juga akan diberikan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial. Dukungan teknis dan konsultasi untuk perlindungan sosial akan membantu pemerintah meningkatkan penargetan subsidi energi, subsidi pangan, dan subsidi untuk input sektor pertanian. ADB juga akan mendukung perluasan program asuransi kesehatan universal dengan meningkatkan teknologi *e-health* dan memperkuat penyampaian layanan di daerah.

3. Tema Lintas Sektor

56. **Kerja sama dan integrasi kawasan.** Sebagai perekonomian terbesar di ASEAN, Indonesia akan sangat diuntungkan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN. Layanan pengetahuan dan upaya mendukung reformasi akan ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan terhadap pendalaman integrasi kawasan. CPS juga akan terus mendukung partisipasi Indonesia dalam prakarsa subkawasan yang penting, seperti Program *Heart of Borneo* dan *Coral Reef Initiative*. Di bawah kedua prakarsa subkawasan ini, ADB akan mendukung partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam sambil membangun mata pencaharian berkelanjutan.

57. **Teknologi informasi dan komunikasi untuk dukungan pembangunan.** Konektivitas pita lebar yang mudah diakses, andal, dan terjangkau merupakan landasan untuk menumbuhkan layanan terkait TIK di berbagai sektor dan untuk mentransformasikan Indonesia menjadi perekonomian digital. Mengingat kesenjangan digital yang terjadi di negara kepulauan ini, ADB akan meningkatkan kemampuan pemerintah dan sektor swasta guna menyampaikan perluasan konektivitas yang andal, berkapasitas lebih tinggi, dan bermutu lebih baik untuk layanan publik, serta pengembangan sektor swasta sejalan dengan rencana pita lebar nasional Indonesia.

58. **Solusi pengetahuan.** Peran layanan pengetahuan ADB akan ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pemerintah, dengan memberikan dukungan pengetahuan di tiga bidang luas. Pertama, penciptaan pengetahuan (*knowledge generation*) akan sejalan dalam upaya ADB mendorong reformasi kebijakan berdasarkan bukti dan pengembangan program. Kedua, produk dan layanan pengetahuan akan diberikan untuk menanggapi permintaan yang menjawab langkah-langkah kebijakan spesifik. Ketiga, sejumlah persoalan strategis jangka menengah terpilih akan dipecahkan untuk membantu pemerintah merumuskan pengembangan jangka panjang strategi, kebijakan, dan programnya. Rencana pengetahuan negara dijabarkan di Lampiran 2.

59. **Tema lintas sektor lainnya.** Jika relevan, sejumlah tema akan diutamakan, dalam dukungan ADB untuk Indonesia. Tema ini termasuk (i) meningkatkan pengembangan sektor swasta melalui kerjasama publik swasta, operasi sektor swasta, peningkatan investasi, dan memperkuat lingkungan yang membantu sektor swasta; (ii) mengedepankan tata kelola yang baik di berbagai sektor dan BUMN melalui dukungan bagi *e-governance*, penguatan sistem pengadaan publik dan perlindungannya, serta memungkinkan sistem teknologi informasi; dan

(iii) mendorong kesetaraan gender dengan mengatasi hambatan gender melalui operasi ADB, layanan pengetahuan, dan dialog. Jika relevan, pelaksanaannya akan dilandaskan pada analisis dan kajian gender terperinci.¹⁹ Tema lintas sektor ini akan dimasukkan dalam rancangan, kajian, dan pelaksanaan semua kegiatan relevan yang didukung di bawah CPS.

IV. PELAKSANAAN STRATEGI

A. Parameter Sumber Daya Indikatif

60. Rencana program operasional ADB untuk 2016–2019 melibatkan sumber daya modal biasa sekitar \$2 miliar per tahun untuk pinjaman sektor publik. Pembiayaan sektor swasta pada dasarnya lebih rentan terhadap gejolak mengingat kondisi pasar yang sedang berubah; meski demikian, ADB akan terus membangun operasi di sektor swasta agar melampaui rata-rata \$150 juta per tahun yang dicapai pada 2013–2015. Selain itu, moda pembiayaan bersama akan dilakukan agar dampak program operasional ADB lebih besar. Secara keseluruhan, \$9,1 juta dalam sumber daya non-pinjaman sudah direncanakan untuk 2016–2019, dengan tambahan \$59,1 juta dalam pembiayaan bersama, sehingga menjadikan nilai total program non-pinjaman mencapai \$68,2 juta untuk CPS. Parameter untuk biaya yang ditanggung bersama tidak berubah.²⁰

B. Menanggapi Kebutuhan Negara Berpenghasilan Menengah

61. CPS akan diwujudkan melalui serangkaian instrumen, termasuk PBL, RBL, serta pinjaman proyek dan TA sebagai katalisator. Pinjaman langsung dengan jaminan pemerintah bagi beberapa BUMN juga akan diberikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Belajar dari temuan saat mengkaji sistem perlindungan dan pengadaan, serta sejalan dengan reformasi dalam sistem pengadaan ADB, akan diambil langkah-langkah untuk mengakreditasi dan menerapkan sistem keagenan dalam berbagai proyek ADB.

62. Program pinjaman dan non-pinjaman ADB akan sangat terfokus dan selektif. ADB akan mengadopsi solusi yang melibatkan teknologi terdepan untuk menambah nilai, serta akan mendorong reformasi yang memungkinkan transformasi teknologi. Sejalan dengan prioritas strategis yang dijabarkan di atas, ADB akan mendukung program reformasi yang dipimpin pemerintah di bidang energi bersih, pendidikan, iklim investasi, sektor keuangan, reformasi fiskal, dan penyampaian layanan pemerintah daerah. PBL akan diberikan secara selektif guna mendukung reformasi yang sangat penting dan akan dilaksanakan selama beberapa tahun guna memungkinkan pelaksanaan reformasi yang berkelanjutan. TA terkait kebijakan dan konsultasi akan diberikan untuk membantu terciptanya analisis berdasarkan bukti yang diperlukan guna mendukung proses reformasi. Dukungan untuk pembangunan infrastruktur akan meningkat hingga dua per tiga dari program. RBL dan proyek investasi konvensional akan disiapkan untuk meningkatkan penyampaian layanan infrastruktur. Kemudian, akan dilakukan pembiayaan proyek dan pinjaman langsung bagi beberapa BUMN terpilih. ADB juga akan memberikan pembiayaan bagi PT. Indonesia Infrastructure Finance selaku perantara keuangan yang membiayai infrastruktur kuasi-komersial.

¹⁹ ADB. 2015. *Indonesia Gender Analysis* [<http://www.adb.org/publications/summary-indonesias-gender-analysis>].

²⁰ Plafon tanggungan biaya bersama untuk pinjaman dan TA akan dipertahankan pada 99%; tidak ada plafon tanggungan biaya bersama yang khusus untuk sektor tertentu; tidak akan diterapkan batas tertentu untuk negara atas pembayaran biaya berulang; serta pajak dan cukai akan layak untuk pembiayaan ADB.

63. **Pendekatan.** CPS akan memberikan program dukungan yang lebih besar, diurutkan dengan lebih baik, dan lebih mudah diprediksi. Sinergi lintas program akan dikedepankan di bawah CPS dengan (i) melengkapi reformasi di seluruh perekonomian melalui dukungan bagi reformasi kelembagaan; (ii) mengombinasikan dukungan bagi reformasi, investasi strategis, dan pengetahuan baru di setiap bidang dukungan yang menjadi prioritas; (iii) mengonsentrasikan dukungan investasi untuk wilayah Indonesia timur yang lebih miskin; dan (iv) mendukung reformasi yang menciptakan peluang bagi operasi sektor swasta sebagai katalisator. CPS akan memanfaatkan sinergi lintas program untuk menangani simpul persoalan yang lebih besar.

64. **Mempercepat persiapan proyek dan kepemilikan pemerintah.** Jika pemerintah ingin mencapai target infrastrukturnya yang tinggi, diperlukan dukungan pada berbagai lembaga pelaksana untuk mempersiapkan program dan proyek. Untuk itu, CPS akan mendukung fasilitas pengembangan proyek berskala besar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fasilitas ini akan digunakan untuk membantu pemerintah mempersiapkan perencanaan sejumlah proyek infrastruktur publik melalui studi kelayakan dan rancangan teknis terperinci.

65. **Mendorong operasi sektor swasta dan non-negara, serta kerjasama publik swasta.** ADB akan mendorong operasi sektor swasta dan non-negara di Indonesia. Sinergi yang lebih erat antara operasi ADB di sektor swasta dan publik akan dijalin guna membuka opsi investasi ADB secara lebih luas. Meskipun dukungan ADB untuk swasta dan non-negara bergantung pada permintaan pasar terhadap pembiayaan ADB, Departemen Operasi Sektor Swasta (*Private Sector Operations Department*) ADB akan mengejar potensi peluang investasi di beberapa bidang, termasuk energi bersih, transportasi, TIK, agribisnis, pembiayaan mikro, dan pembiayaan perumahan.

66. Kerjasama Publik Swasta (KPS) masih akan terus didukung. ADB akan mendukung institusi Indonesia yang bertugas mengembangkan KPS, serta mendorong upaya untuk merancang model KPS dan membawanya hingga tahap penyelesaian keuangan.²¹

C. Pemantauan Hasil

67. Pelaksanaan CPS akan dipantau dengan menggunakan kerangka hasil di tingkat negara dan sektor, yang diperbarui tiap tahun pada saat dilakukan kegiatan kajian portofolio dan program tingkat negara (Lampiran 1). Jika diperlukan, ADB akan memperkuat kapasitas pemantauan dan evaluasi di lembaga eksekutif. Kerangka hasil CPS didasarkan pada tujuan dan indikator yang diambil langsung dari RPJMN, yang dipantau dan dilaporkan tiap tahun.

D. Risiko

68. **Stabilitas makroekonomi.** Fundamental makroekonomi Indonesia masih tetap solid. Namun, masih terdapat sejumlah kerentanan. Apabila tidak dikelola dengan baik, ketidakstabilan di pasar keuangan dan komoditas global berpotensi menghambat investasi publik dan upaya penyampaian layanan.²²

²¹ Sudah ada kemajuan besar dalam meningkatkan kebijakan dan lingkungan peraturan bagi KPS. Selain itu, sejumlah instrumen baru (seperti pembiayaan untuk menutup kesenjangan kelayakan/*viability gap financing*) telah diperkenalkan demi menjadikan semua jenis KPS lebih layak.

²² ADB. 2015. *Indonesia Risk Assessment and Risk Management Plan 2016–2019*. Manila.

69. **Kerentanan Terhadap Korupsi.** Korupsi masih menjadi masalah, terutama mengingat upaya mobilisasi penerimaan pemerintah yang masih lemah dan ketergantungan yang makin besar pada belanja di tingkat daerah. Kerentanan terhadap korupsi dalam layanan administratif diatasi melalui peningkatan pemanfaatan produk dan layanan teknologi informasi, yang memberikan tingkat kendali, transparansi, dan pengawasan lebih besar. Masyarakat madani yang aktif juga membantu dalam mendorong tata kelola yang baik dan memerangi korupsi.

70. **Mitigasi risiko.** Melalui analisis dan dialog kebijakan, ADB akan terus mendukung upaya pemerintah menjamin stabilitas makroekonomi, meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan mendiversifikasi kegiatan ekonomi. Dukungan ADB untuk RBL akan digunakan membantu memperkuat sistem fidusia dan tata kelola lembaga eksekutif dan pelaksana yang terlibat dalam operasi tersebut. Dukungan bagi reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas akan membantu memperkuat kapasitas pengadaan dan audit di seluruh Indonesia. Dukungan bagi jaringan TIK, manajemen keuangan publik, dan pemerintah daerah akan terus membangun kapasitas tata kelola yang baik serta meningkatkan mutu dan integritas penyampaian layanan. Bila terjadi guncangan makroekonomi mendadak yang berat, ADB akan mempertimbangkan penyediaan bantuan keuangan guna membantu Indonesia menghadapi guncangan tersebut.

KERANGKA HASIL STRATEGI KEMITRAAN TINGKAT NEGARA

A. Indonesia: Kerangka Hasil Strategi Kemitraan Tingkat Negara, 2016–2019

Indikator Dampak Pembangunan Negara yang Selaras dengan CPS				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional turun dari 11% pada 2014 menjadi 8% pada 2019. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan \$2 per hari turun dari 43% pada 2011 menjadi di bawah 30% pada 2019. 2. Tingkat pertumbuhan PDB per kapita naik dari 5,1% pada 2014 menjadi 8,0% pada 2019. 3. Indeks Gini turun dari 0,41 pada 2014 menjadi 0,36 pada 2019. 4. Indeks mutu lingkungan naik dari 63,0–64,0 pada 2014 menjadi 66,5–68,5 pada 2019. 				
Tujuan dan Dampak Terkait CPS	Bidang Prioritas CPS	Hasil Penting yang Turut Dikontribusikan ADB	Indikator Hasil^a	Sumber Daya CPS
Peningkatan layanan infrastruktur	Energi bersih	Tercapainya akses energi berkelanjutan bagi seluruh penduduk Indonesia	Persentase rumah tangga dengan akses listrik dari sumber jaringan dan non-jaringan meningkat dari 81,7% pada 2014 menjadi 96,6% pada 2019.	Portofolio berjalan Proyek pinjaman negara yang masih berjalan (s/d 31 Desember 2015): Jumlah: 18 Nilai: \$3.231 juta Operasi dan kontribusi yang direncanakan Pinjaman negara: \$9.207 juta dari OCR dan \$750 juta dari pembiayaan bersama untuk 2016–2019 Bantuan teknis dan hibah: \$6,6 juta dari Dana Khusus Bantuan Teknis–Lain-lain dan \$56,8 juta dari pembiayaan bersama untuk 2016–2019
	Infrastruktur perkotaan dan manajemen sumber daya air yang kuat	Peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan perdesaan.	Produksi beras total dari lahan tadah hujan dan irigasi meningkat menjadi 82,0 juta ton pada 2019 (ukuran dasar/baseline 2014: 70,6 juta ton). Asupan energi pangan penduduk Indonesia meningkat menjadi 2.150 kkal/kapita/hari (ukuran dasar 2014: 1.967 kkal/kapita/hari).	
	Sanitasi perkotaan	Peningkatan ketersediaan air karena membaiknya sumber air baku.	Kapasitas waduk total meningkat menjadi 19,0 miliar m ³ pada 2019 (ukuran dasar 2014: 15,8 miliar m ³).	
Tata kelola ekonomi yang lebih baik	Penguatan manajemen fiskal.	Mempertahankan belanja sektor infrastruktur.	Peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur dari 1,4% PDB pada 2014 menjadi 3,0% PDB pada 2019.	
	Reformasi untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan Reformasi pasar modal dan inklusi keuangan	Percepatan investasi asing langsung (FDI) dan investasi domestik langsung (DDI)	Peningkatan nilai keseluruhan investasi FDI dan DDI dari Rp463 triliun pada 2014 menjadi Rp933 triliun pada 2019	

Tujuan dan Dampak Terkait CPS	Bidang Prioritas CPS	Hasil Penting yang Turut Dikontribusikan ADB	Indikator Hasil ^a	Sumber Daya CPS
	Manajemen keuangan publik untuk meningkatkan penyampaian layanan lokal	<p>Peningkatan peluang pasar tenaga kerja bagi penduduk Indonesia</p> <p>Peningkatan peluang bagi perempuan untuk bekerja</p> <p>Peningkatan pembangunan dan inklusi sektor keuangan</p> <p>Peningkatan manajemen dan kapasitas fiskal pemerintah daerah</p> <p>Peningkatan kapasitas auditor internal pemerintah dan pegawai keuangan publik dalam manajemen keuangan publik.</p>	<p>Partisipasi tenaga kerja formal meningkat dari 40% pada 2014 menjadi 51% angkatan kerja pada 2019.</p> <p>Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan meningkat dari 48,9% pada 2015 menjadi 55% pada 2019.</p> <p>Ukuran sektor keuangan sebagai persentase PDB meningkat dari 103% pada 2014 menjadi 115% pada 2019.</p> <p>Akses ke layanan keuangan oleh 40% penduduk termiskin Indonesia meningkat dari 21,9% pada 2014 menjadi 25% pada 2019.</p> <p>Peningkatan pajak daerah total dari Rp114,5 triliun pada 2013 menjadi Rp143,1 triliun pada 2019.</p> <p>Persentasi opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian meningkat dari 74% pada 2014 menjadi 100% pada 2019 di tingkat pusat, dan dari 33,35% pada 2013 menjadi 60% pada 2019 di tingkat pemerintah daerah.</p>	
Peningkatan pengembangan sumber daya manusia	Kebijakan sektor dan reformasi kelembagaan Mutu pendidikan Pengembangan keterampilan	Sistem pendidikan memenuhi kebutuhan negara berprestasi menengah dan mendukung perkembangan perekonomian yang produktif, berdaya saing, dan inovatif.	<p>Persentase sekolah dasar dengan akreditasi minimum B naik dari 68,7% pada 2013 menjadi 84,2% pada 2019.</p> <p>Persentase sekolah menengah pertama dengan akreditasi minimum B naik dari 62,5% pada 2013 menjadi 81% pada 2019.</p> <p>Persentase sekolah menengah atas dengan akreditasi minimum B naik dari 73,5% pada 2013 menjadi 84,6% pada 2019.</p> <p>Persentase sekolah menengah atas kejuruan dan pra-profesional yang memiliki tingkat akreditasi minimum B untuk kompetensi</p>	

Tujuan dan Dampak Terkait CPS	Bidang Prioritas CPS	Hasil Penting yang Turut Dikontribusikan ADB	Indikator Hasil ^a	Sumber Daya CPS
			keterampilan, naik dari 48,2% pada 2013 menjadi 65,0% pada 2019.	

ADB = Asian Development Bank; BPK = Badan Pemeriksa Keuangan, CPS = country partnership strategy (strategi kemitraan negara), DDI = domestic direct investment (investasi domestik langsung), FDI = foreign direct investment (investasi asing langsung), PDB = produk domestik bruto, kcal = kilo kalori, m³ = meter kubik, OCR = ordinary capital resources (sumber daya modal biasa).

^a Data indikator akan dipilah-pilah menurut gender, jika data tersebut tersedia dari pemerintah.

Sumber: Pemerintah Indonesia, 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional: RPJMN, 2015–2019*. Jakarta.

RENCANA PENGETAHUAN TINGKAT NEGARA

A. Pendahuluan

1. Dukungan terhadap solusi pengetahuan di negara anggotanya merupakan prioritas penting Asian Development Bank (ADB) di bawah Strategi 2020.¹ Agenda manajemen pengetahuan ini dipertajam melalui Rencana Aksi Manajemen dan Arahan Pengetahuan (*Knowledge Management and Directions Action Plan*) 2013–2015², Kajian Tengah Waktu terhadap Strategi 2020 (*Midterm Review of Strategy 2020*), Rencana Aksi Kajian Tengah Waktu (*Midterm Review Action Plan*), dan Kerangka Hasil Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management Results Framework*) yang terkait.³ Strategi korporasi ini dilaksanakan di tingkat kawasan melalui Arahan Perencanaan (*Planning Directions*) dari Presiden untuk periode 2015–2017 dan 2016–2018.⁴

2. Bagi Pemerintah Indonesia, upaya berbagi pengetahuan dipandang sebagai pendorong perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.⁵ Pemerintah mendirikan simpul pengetahuan (*knowledge hub*) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk memprioritaskan persoalan yang perlu diselidiki, untuk berbagi dan menyebarkan pengetahuan, serta untuk merespons permintaan nasihat yang mendesak. Dengan menggunakan pendekatan simpul pengetahuan, pemerintah berupaya meningkatkan sosialisasi dan berbagi pengetahuan, menangkap pembelajaran dengan lebih baik, mengelola kemitraan pengetahuan, meningkatkan keterlibatan dan inklusi institusi Indonesia yang berkaitan dengan pengetahuan, serta memperkuat kerja sama pengetahuan di antara negara berkembang.

3. Rencana Pengetahuan Negara Indonesia 2016–2019 memandu keterlibatan ADB dalam penyiapan dan penyediaan produk dan layanan pengetahuan kepada Indonesia. Tujuan rencana tersebut adalah untuk (i) memberikan dukungan pengetahuan yang didorong oleh permintaan, serta yang responsif dan tepat waktu; (ii) memaksimalkan manfaat operasional pengetahuan; (iii) mengkoordinasikan dukungan pengetahuan dengan mitra pembangunan lainnya dan memobilisasi pembiayaan bersama secara efektif; (iv) bekerja sama erat dengan pengguna pengetahuan non-negara; dan (v) meningkatkan sosialisasi pengetahuan di dalam Indonesia.

B. Kerangka Pengetahuan Indonesia

4. Berbagai institusi pengetahuan di Indonesia berperan penting dalam mendukung para pembuat peraturan dan kebijakan dalam melakukan penelitian berorientasi kebijakan dan saran kebijakan publik. Institusi penelitian telah berkembang, dari yang sebelumnya berupa segelintir institusi besar yang umumnya disponsori pemerintah, kini menjadi lebih banyak institusi yang berfokus pada beragam persoalan, independen, dan memperoleh dana dari berbagai sumber.

¹ ADB. 2008. *Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008–2010*. Manila.

² ADB. 2013. *Knowledge Management Directions and Action Plan (2013-2015): Supporting “Finance ++” at the Asian Development Bank*. <http://www.adb.org/documents/knowledge-management-directions-and-action-plan-2013-2015>.

³ ADB. 2014. *Midterm Review of Strategy 2020: Meeting the Challenges of a Transforming Asia and Pacific*. Manila;

ADB. 2014. *Midterm Review of Strategy 2020 Action Plan*. Manila (yang diperbarui secara berkala).

⁴ ADB. 2014. *Memorandum: Planning Directions: Work Program and Budget Framework 2015–2017*. eStar; dan ADB. 2014. *Memorandum: Planning Directions: Work Program and Budget Framework 2016–2018*. eStar.

⁵ Pemerintah Indonesia. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional: RPJMN, 2015–2019*. Jakarta.

5. **Penelitian yang disponsori.** Institusi penelitian terbesar yang disponsori pemerintah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, adalah institusi payung bagi 47 pusat penelitian yang menangani ilmu sosial dan budaya, ekonomi, studi populasi, dan politik. Di luar itu, beberapa kementerian dan lembaga pemerintah mendirikan biro kuasi-penelitiannya masing-masing untuk mendukung proses pembuatan kebijakan di dalam kementerian atau lembaga tersebut. Universitas terkemuka di Indonesia berkontribusikan pengetahuannya kepada para pembuat kebijakan dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan melalui afiliasi kelembagaan formal dan hubungan informal, karena banyak dari antara pemimpin institusi tersebut memiliki keterkaitan pengalaman. Ada pula beragam pusat penelitian dan studi kebijakan (*think tank*) yang disponsori masyarakat madani, yang memberikan keahlian dan panduan kebijakan dalam hal penelitian dan analisis terkait persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Institusi penelitian di Indonesia, baik yang disponsori oleh pemerintah ataupun masyarakat madani, akan memperoleh manfaat dari paparan dan kerja sama internasional yang lebih besar.

6. **Berbagi informasi.** Pembagian data di antara berbagai institusi di Indonesia masih menjadi kendala. Pembuat kebijakan di satu institusi sering kali kesulitan mengakses data yang dimiliki institusi lainnya. Sering terjadi ketidakcocokan dan perbedaan data penting untuk persoalan yang sama. Terkadang, data untuk pembuatan kebijakan nampak memiliki kesalahan dan mengandung bias yang serius, tetapi sulit untuk mengoreksi angka resmi tersebut.

7. **Pengetahuan dan proses kebijakan.** Informalitas dan hubungan pribadi memang penting, baik dalam mendapatkan akses ke informasi maupun berkontribusikan analisis bermutu bagi pengembangan kebijakan. Kurangnya pengetahuan spesifik, akses minimal ke layanan informasi yang komprehensif, dan terbatasnya sumber daya manusia turut berkontribusi terhadap perumusan kebijakan publik tanpa analisis berdasarkan bukti menyeluruh, dan sangat mengandalkan keahlian eksternal.

8. **Pengguna pengetahuan.** Pengguna pengetahuan berbeda-beda dalam kebutuhannya akan produk dan layanan pengetahuan, serta taraf pengaruh dan minat mereka sehubungan dengan kebijakan tertentu. Pengguna utamanya mencakup: (i) pembuat kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah, termasuk birokrat senior, menteri, dan anggota parlemen; (ii) masyarakat madani dan para akademisi; serta (iii) media yang mengakses produk dan layanan pengetahuan untuk memberi informasi bagi opini publik. Selain itu, publik secara umum juga menggunakan layanan pengetahuan ADB. Mereka pun makin terlibat dalam proses politik dan mengikuti dialog perumusan kebijakan.

C. Cakupan Operasi Pengetahuan yang Direncanakan di ADB

9. **Peran ADB dalam mendukung produk dan layanan pengetahuan.** ADB dapat memperkuat kemampuan institusi penelitian yang disponsori pemerintah dan masyarakat madani, sekaligus menyediakan produk dan layanan pengetahuan yang didorong permintaan secara tepat waktu. Pelajaran dari pemanfaatan pengetahuan ADB sebelumnya menunjukkan bahwa produk dan layanan pengetahuan perlu (i) berdasarkan permintaan, (ii) memfasilitasi dialog kebijakan berdasarkan bukti, (iii) memberi nasihat strategis dan tepat waktu pada pemerintah dan/atau masyarakat madani, (iv) membawa pengalaman internasional dan kawasan, (v) disebarkan ke audiens yang ditargetkan dengan format yang tepat, (vi) melibatkan aktor non-negara, (vii) dikoordinasikan dengan mitra pembangunan lainnya yang menangani hal serupa, dan (viii) mengikutsertakan pembelajaran dari Indonesia dan kawasan.

10. Pilar strategis ADB di Indonesia adalah peningkatan layanan infrastruktur, tata kelola ekonomi yang lebih baik, dan peningkatan pengembangan sumber daya manusia. Program ke

depannya melibatkan dukungan khusus bagi produk dan layanan pengetahuan di bawah setiap pilar tersebut. ADB juga akan membantu pemerintah untuk berbagai produk dan layanan pengetahuan yang melampaui sektor utamanya, termasuk menyelidiki persoalan lintas bidang yang berkontribusi terhadap strategi dan perumusan kebijakan jangka menengah.

11. Selain itu, pemerintah juga memperkirakan bahwa keahlian ADB mungkin akan diperlukan selama periode strategi kemitraan negara dalam hal agribisnis dan akuakultur, integrasi ASEAN, pengembangan pasar modal, investasi ke energi bersih, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konektivitas, kinerja sektor pendidikan, reformasi kebijakan energi, infrastruktur energi, inklusi keuangan, layanan keuangan, ketimpangan, peningkatan penyampaian infrastruktur, stabilitas makroekonomi, instrumen pembiayaan baru, produktivitas, manajemen keuangan publik, kerjasama publik swasta, manajemen sektor publik, perlindungan sosial, reformasi BUMN, pembangunan perkotaan, pengembangan transportasi perkotaan, dan manajemen sumber daya air.

D. Implementasi

12. **Pengaturan implementasi.** Produk dan layanan pengetahuan akan diidentifikasi melalui proses perencanaan tahunan yang melibatkan ADB dan pemerintah.⁶ Produk dan layanan akan dimasukkan dalam dokumen yang berkaitan,⁷ serta mencakup hal-hal yang memerlukan perencanaan dan persiapan lebih panjang, sesuai hasil identifikasi oleh pemerintah atau ADB, dan akan disetujui sebagai prioritas oleh pemerintah. ADB juga akan bersikap responsif terhadap keadaan yang berubah dan persoalan baru yang muncul, serta permintaan tak terencana dari pemerintah akan produk dan layanan pengetahuan.⁸

13. Simpul pengetahuan di tingkat negara akan dipimpin oleh kepala perwakilan ADB di Indonesia, yang akan bertindak sebagai pemelihara pengetahuan (*knowledge custodian*). Produk dan layanan pengetahuan ADB akan diberikan melalui Departemen Asia Tenggara (*Southeast Asia Department*), berbagai kelompok sektor dan tematik, Departemen Penelitian Ekonomi dan Kerjasama Kawasan (*Economic Research and Regional Cooperation Department*), serta *ADB Institute*.

14. ADB dan pemerintah bermaksud memperluas cakupan produk pengetahuan agar dapat menargetkan pengguna akhir dengan lebih baik.⁹ Selain itu, ADB juga akan memperdalam hubungan yang sudah ada dengan akademisi dan lembaga *think tank* melalui memorandum kesepahaman secara kelembagaan guna memfasilitasi keterlibatan langsung dalam proses penelitian dan saran kebijakan, dengan sasaran untuk meningkatkan pelibatan institusi tersebut agar bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia dan kawasan ini. ADB juga akan memfasilitasi, melalui memorandum tersebut, kaitan dengan pusat keunggulan kawasan dan global yang memiliki hubungan dengan ADB. Pemerintah memiliki program berbagi pengetahuan yang sudah berjalan lancar dengan negara berkembang lainnya. Jika sesuai, ADB akan mendukung program-program tersebut.

⁶ ADB akan mengidentifikasi produk dan layanan pengetahuan yang diusulkan dari departemen di ADB dan *ADB Institute* setiap tahunnya, serta mendiskusikannya dengan pemerintah selama misi program tahunan.

⁷ Dokumen yang berkaitan adalah lampiran terhadap rencana bisnis operasi negara, serta mencantumkan produk dan layanan pengetahuan untuk tahun berikutnya.

⁸ Produk dan layanan pengetahuan tak terencana disebut oleh pemerintah sebagai pengetahuan "just-in-time".

⁹ Bergantung pada kebutuhan pengguna akhir, ADB akan memberikan ringkasan kebijakan pendek hingga maksimum 4 halaman, kertas kerja yang lebih panjang hingga 30 halaman, dan produk pengetahuan terperinci yang memerlukan analisis dan persiapan lebih banyak.

15. ADB akan memperluas rentang layanan pengetahuannya: meskipun tetap berfokus pada penyelenggaraan atau partisipasi dalam berbagai lokakarya, konferensi, dan seminar, staf ADB akan mengidentifikasi peluang untuk memberikan layanan pengetahuan secara lebih luas, terutama dalam misi lapangan. Ini termasuk memberikan ceramah di sekolah dan universitas mengenai topik-topik tertentu.

E. Komunikasi dan Sosialisasi

16. Untuk memastikan bahwa produk pengetahuan menjangkau audiens yang ditargetkan, penggunaan *platform* yang sudah ada harus dimaksimalkan, termasuk situs publikasi ADB, gudang pengetahuan *online* ADB yang berorientasi penelitian, halaman kegiatan pada situs ADB untuk Indonesia, platform media sosial, dan secara khusus melalui blog (ini ideal untuk materi pengetahuan yang telah disesuaikan, seperti cerita dan foto-foto). Produk pengetahuan yang singkat akan dilengkapi dengan format dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, atau Bahasa Indonesia saja. Penyebaran produk pengetahuan yang tertarget dan hasil-hasil dari layanan pengetahuan akan dikirimkan melalui email atau dikirimkan dalam bentuk cetak pada individu yang tertarik terhadap tema atau sektor tertentu. ADB akan membuat daftar pemangku kepentingan yang akan menjadi target utama untuk berbagai kategori produk pengetahuan, dan akan menyesuaikan kegiatan berbagai produk pengetahuannya untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan tersebut.

17. Berbagi pengetahuan langsung ke publik merupakan salah satu cara paling efektif untuk mensosialisasikan pengetahuan di Indonesia. ADB akan berpartisipasi sebagai fasilitator pengetahuan dan akan terus mencari peluang untuk mengadakan seminar dan lokakarya dalam kegiatan berbagi pengetahuan secara strategis, baik tersendiri maupun dalam kerja sama dengan mitra pemerintah atau mitra setempat. ADB akan meningkatkan keterlibatannya sebagai kontributor dalam acara berbagi pengetahuan, serta bekerja sama secara lebih erat dengan media. Para staf proyek akan didorong untuk membuka kesempatan pada media untuk meliput produk dan kegiatan di bawah proyek mereka; siaran pers akan diterbitkan untuk menyertai peluncuran suatu produk atau acara pengetahuan penting kepada publik.

DAFTAR DOKUMEN YANG BERKAITAN

<http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=INO-2016>

1. *Inclusive and Sustainable Growth Assessment* (Kajian Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan)
2. *Development Coordination Matrix* (Matriks Koordinasi Pembangunan)
3. *Country Operations Business Plan: Indonesia, 2017–2019* (Rencana Bisnis Operasi Tingkat Negara: Indonesia, 2017–2019)

Dokumen Tambahan

4. *Policy-Based Lending in Indonesia* (Pinjaman Berbasis Kebijakan di Indonesia)